

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Barkatullah, A. H. (2019). Hukum transaksi elektronik di Indonesia. Bandung: Nusa Media.
- Barkatullah, A. H. 2017. Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-commerce Di Indonesia. Bandung: Nusamedia.
- Friedman, L. M. (2001). American law: An introduction (2nd ed.). New York: W.W. Norton & Company.
- Hamid, H. 2017. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Makasar. Sah Media.
- Indradewi, A. A. S. N. 2020. Hukum Perlindungan Konsumen: Hubungan Konsumen, Produsen, Asas, Tujuan, Dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana. Denpasar. Udayana University Press.
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). Hukum perlindungan konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kriswandarū, A. S. 2024. Hukum Perlindungan Konsumen. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Kusumadewi, Y., & Sharon, G. 2022. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Makarim, E. (2020). Pengantar hukum telematika: Suatu kompilasi kajian. Depok: Rajawali Pers.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2018). Cyber law: Aspek hukum teknologi informasi. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. 2017. Penelitian hukum. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Masri, E., Handayani, O., Dhianty, R., & Wahyuni, S. 2023. Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A., & Yodo, S. (2021). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Pajaitan, H. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sari, N. 2021. *Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Yogyakarta: UAD Press.
- Shidarta. (2018). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia (Edisi revisi)*. Jakarta: Grasindo.
- Sidabalok, J. (2018). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. 2021. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Solikin, N. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: Qiara Media.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Zulham. (2016). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Kencana.

Artikel dalam Jurnal

- Alpiana, D. A., Astutik, S., Ayuningtyas, F., & Aribawa, M. Y. 2025. Tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi e-commerce perspektif perlindungan konsumen. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 9(2), 473–492.

- Asimah, D. 2021. Menjawab kendala bukti dalam penerapan bukti elektronik. *Jurnal Hukum Peratun*, 3(2), 97–110. <https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110>
- Damayanti, N., & Apriani, R. 2025. Perlindungan hukum bagi konsumen pada kasus perubahan venue konser DAY6 oleh promotor. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 5(2), 344–350.
- Dantes, K. F. (2022). Pengaturan Sistem Elektronik Dalam Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Yang Berkepastian. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 527-536.
- Delpiero, M., Reynaldi, F. A., Ningdiah, I. U., & Muthmainnah, N. 2021. Analisis yuridis kebijakan privasi dan pertanggungjawaban online marketplace dalam pelindungan data pribadi pengguna pada kasus kebocoran data. *Padjadjaran Law Review*, 9(1), 1–22.
- Elviandri, Dimyati, K., & Absori. 2019. Quo vadis negara kesejahteraan: Meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(2), 252–266.
- Eniasih, N. L., & Dantes, K. F. (2025). Implementasi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terkait Penggunaan Klausula Eksonerasi pada Bukti Transaksi Barang di Kota Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(2).
- Fahmi, I. 2023. Tinjauan yuridis normatif terhadap kekaburan norma Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. *Jurnal Lawnesia*, 2(2), 403–417.
- Fista, Y. L., Machmud, A., & Suartini. (2023). Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 12(1), 177–189.
- Mahesa, K. H., Setianto, M. J., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 115-124.

- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. 2020. Prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan sistem elektronik dalam upaya perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 5(2), 132–145. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i2.549>
- Nicholas, K. Y., Priowirjanto, E. S., & Putri, N. S. 2025. Pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik user generated content terhadap penyebaran iklan judi online berdasarkan ketentuan hukum siber di Indonesia. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik, dan Sosial Indonesia*, 2(4), 1–17. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i4.1249>
- Nur, A. W., Rijal, B. M. D. M., Mustafa, D. W., & Nelvi. 2024. Tanggung jawab pelaksana sistem elektronik dalam melindungi informasi pemakai media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. *LEGAL: Journal of Law*, 3(1), 18–29.
- Pranoto, T. Z., Windari, R. A., & Adnyani, N. K. S. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dalam Era Digital: Review Negatif Yang Dilakukan Influencer Di Platfrom Tiktok Shop Yang Merugikan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5187-5201.
- Prastya, K. F. I., Adnyani, N. K. S., & Ardhya, S. N. (2021). Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 617-625.
- Pratama, R., & Wijaya, I. M. (2024). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik. *Jurnal Yustisia*, 13(1), 60–72.
- Purwito, E. 2023. Konsep perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap produk gula pasir kadaluarsa di Kota Surabaya. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(1), 109–129.

- Rachmat, S., Alhady, I., Redra, I., & Ruslina, E. 2025. Transformasi hukum sebagai pondasi ekonomi digital serta inovasi dalam analisis regulasi dan tantangan implementasi. *Jurnal Kelola*, 8(1), 1–9.
- Rahadita, I. B. A., Ardhya, S. N., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Upaya Pengajuan Ganti Kerugian Atas Penipuan Jual Beli Ponsel Ilegal Pada Transaksi Elektronik Melalui E-Commerce. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 149-159.
- Ramadhan, F., & Putri, N. A. (2023). Perlindungan hukum konsumen terhadap hak pengembalian barang dalam transaksi e-commerce. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(2), 108–118.
- Safiranita, T., Waluyo, T. T. P., Calista, E., Ratu, D. P., & Ramli, A. M. 2021. The Indonesian Electronic Information and Transactions within Indonesia's broader legal regime: Urgency for amendment? *Jurnal HAM*, 12(3), 533–551. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.533-552>
- Sari, V. K., & Nasution, M. I. P. 2024. Dampak e-commerce terhadap perkembangan digital. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 18–24. <https://doi.org/10.61722/jaem.v1i4.3113>
- Silalahi, J. A. S., Purba, Y. Y., & Nasution, M. F. 2025. Analisis yuridis terhadap mekanisme perlindungan data pribadi dalam sistem informasi elektronik berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 604–613. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14810>
- Soetedjo, T., & Andryawan. (2023). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian jual beli secara elektronik. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(2).
- Su, B. R., Lie, G., & Putra, M. R. S. 2025. Kekosongan hukum dan ketidakjelasan tanggung jawab platform e-commerce atas produk ilegal dalam transaksi digital. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 1–16.

Sukmaningsih, N. K. I. A., Pratama, I. P. A., & Prathama, A. A. G. A. I. 2025. Paradigma baru dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Upaya adaptasi terhadap dinamika hukum di era digital dan globalisasi. *Jurnal Yustitia*, 20(1), 67–76. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v20i1.1459>

Wangi, N. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2023). Analisis yuridis hak ulayat terhadap kepemilikan tanah adat berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 112-121.

SKRIPSI

Shandy, W. 2022. Kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Yogantara, I. 2025. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi melalui e-commerce menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Universitas Satya Negara Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

